

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA
OLEH PIHAK LESSOR DALAM JAMINAN FIDUSIA**

ABSTRAK

Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak lessor dalam jaminan fidusia. Adanya perlindungan bagi konsumen atas penarikan paksa oleh pihak lessor langkah yang tepat untuk suatu penyelesaian sengketa dan konflik yang terjadi. Indonesia merupakan negara hukum (Rechtstaat), yaitu Negara yang semua sikap dan perilaku dan perbuatan, yang dilakukan oleh para pemangku kuasa maupun oleh para masyarakatnya harus berdasarkan hukum. Dengan penelitian atas judul tersebut maka tujuannya ialah memberikan pemahaman bagi pihak lessor dan juga pihak konsumen terkait penarikan secara paksa benda yang menjadi jaminan fidusia. Eksekusi adalah pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, yaitu pemenuhan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Seyogyanya pihak lessor menempuh jalur hukum dengan melalui pengadilan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi dari konsumen, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dalam melaksanakan penyitaan barang terhadap konsumen apabila terjadi keterlambatan kredit. Harapan untuk peneliti supaya kasus konflik dan sengketa penarikan paksa barang jaminan fidusia dapat menurun.

Metode penelitian dengan cara pendekatan dan penelitian yang diambil oleh peneliti. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang

berpegang dari segi-segi yuridis / hukum atau peraturan-peraturannya dalam mencari dan mengumpulkan data. Dalam metode pendekatan yuridis normatif ini juga berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya terhadap masalah yang akan diteliti serta pengumpulan kepustakaan dari UU,PP dan buku.

Adapun hasil dari penelitian ini masih banyak hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kaitannya dengan penarikan paksa oleh pihak lessor terhadap barang jaminan fidusia, diantaranya adalah penarikan secara paksa barang jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak ketiga (*debt collector*), cara-cara penarikan paksa barang jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta belum sepenuhnya berjalan pengeimplementasian peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman fidusia.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa masih belum optimal. Masih sering terjadi praktek dilapangan pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan masih kurangnya pemahaman debitur (konsumen) mengenai konsekuensi hukum akibat perjanjian yang sudah dibuat, diperlukan pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jaminan fidusia untuk semua pihak, sehingga baik pihak kreditur maupun pihak debitur memahami secara utuh mengenai hak dan kewajiban yang timbul atas terjadi sebuah perjanjian fidusia.

Adapun dasar hukum dalam praktek jaminan fidusia baik bagi kreditur maupun debitur adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2018 menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Penarikan Paksa; Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Consumer protection against forced withdrawals by the lessor in fiduciary guarantees. The existence of protection for consumers against forced withdrawals by the lessor is the right step for a settlement of disputes and conflicts that occur. Indonesia is a state of law (Rechtstaat), namely a country where all attitudes and behaviors and actions carried out by the authorities and by the people must be based on law. With research on this title, the goal is to provide understanding for the lessor and also the consumer regarding the forced withdrawal of objects that are fiduciary guarantees. Execution is the implementation or decision of a court or deed, namely the fulfillment of the payment of creditor obligations through the proceeds from the sale of certain objects belonging to the debtor. The lessor should take legal action through the courts to resolve the problem of default from consumers, so that they have permanent legal force in carrying out the confiscation of goods against consumers in the event of a delay in credit. The hope for researchers is that

cases of conflict and disputes over the forced withdrawal of fiduciary goods can be reduced.

The research method by way of approach and research taken by researchers. The approach used in this study is a normative juridical approach, which is an approach that adheres to juridical/legal aspects or regulations in finding and collecting data. In this normative juridical approach method, it also tries to synchronize the applicable legal provisions with its implementation on the issues to be studied as well as the collection of literature from laws, regulations and books.

As for the results of this study there are still many things that are not in accordance with the laws and regulations in relation to the forced withdrawal by the lessor of fiduciary collateral, including the forced withdrawal of fiduciary collateral by finance companies through third parties (debt collectors), how to -how to forcibly revoke fiduciary collateral items that are not in accordance with laws and regulations and have not fully implemented laws and regulations related to fiduciary loan agreements.

The conclusion of this study is that consumer protection against forced recalls is still not optimal. There are still frequent practices in the field of implementing the execution of fiduciary collateral contrary to laws and regulations and there is still a lack of understanding of debtors (consumers) regarding the legal consequences of agreements that have been made, assistance and socialization from the government are needed regarding regulations related to fiduciary guarantees for all parties, so that both the

creditor and the debtor fully understand the rights and obligations arising from the occurrence of a fiduciary agreement.

The legal basis in the practice of fiduciary guarantees for both creditors and debtors is the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2018 stating Article 15 paragraph (2) Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

Keywords: Legal Protection; Forced Withdrawal; Fiduciary Guarantee.